



KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

NOMOR : 123/KPTTUN.W5-TUN/SK.KP.04.5/IX/2025

TENTANG

TIM PENILAI PENDAHULUAN / EVALUASI PENILAIAN MANDIRI
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (PMPZI) TERHADAP PENGADILAN TATA
USAHA NEGARA YANG DIUSULKAN MEMPEROLEH PREDIKAT WBK/WBBM
PADA SATUAN KERJA WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI
TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG,

Menimbang : a. bahwa untuk melakukan penilaian / mengevaluasi penilaian mandiri pembangunan Zona Integritas terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang maka perlu menunjuk Tim Penilai Pendahuluan;

b. bahwa nama-nama yang tercantum dibawah ini dipandang mampu menjadi Tim Penilai Pendahuluan terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang di usulkan memperoleh predikat WBK/WBBM pada Satuan Kerja Sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2014;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen perubahan;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2012 tentang Budaya Pengembangan Budaya Kerja;

7. Peraturan ...

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Instansi Pemerintah;

MEMUTUSKAN


- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TENTANG TIM PENILAI PENDAHULUAN / EVALUASI PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (PMPZI) TERHADAP PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YANG DIUSULKAN MEMPEROLEH PREDIKAT WBK/WBBM PADA SATUAN KERJA WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TAHUN 2025.
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Nomor 19/KPTTUN.W5-TUN/SK.KP.04.5/I/2025 Tanggal 2 Januari 2025 tentang Perubahan Kedua Tim Penilai Pendahuluan / Evaluasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (Pmpzi) Terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Diusulkan Memperoleh Predikat WBK/Wbbm pada satuan kerja wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2025.
- KEDUA : Membentuk dan Menetapkan kembali Tim Penilai Pendahuluan / Evaluasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) Terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Diusulkan Memperoleh Predikat WBK/Wbbm pada satuan kerja wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2025.
- KETIGA : Mengangkat mereka yang nama-namanya tercantum dalam lampiran Surat keputusan ini sebagai Tim Penilai Pendahuluan/Evaluasi Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (Pmpzi) Terhadap Pengadilan Tata Usaha Negara Yang Diusulkan Memperoleh Predikat WBK/Wbbm pada satuan kerja wilayah hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Tahun 2025.

KEEMPAT ..x

- KEEMPAT : Tim bertugas melakukan penilaian / evaluasi terhadap Penilaian Mandiri pembangunan zona integritas yang telah dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang pada alamat pmpzi.mahkamahagung.go.id. Tahun 2025;
- KELIMA : Melaporkan Hasil penilaian/evaluasi terhadap Penilaian Mandiri yang telah dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang pada alamat pmpzi.mahkamahagung.go.id. Tahun 2025 kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
Pada tanggal 24 September 2025

Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,



A. Syaifullah

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang

Nomor : 123/KPTTUN.W5-TUN/SK.PW1.2.1/IX/2025

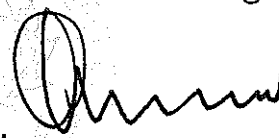
Tanggal : 24 September 2025

**TIM PENILAI PENDAHULUAN / EVALUASI PENILAIAN MANDIRI
PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (PMPZI) TERHADAP PENGADILAN TATA
USAHA NEGARA YANG DIUSULKAN MEMPEROLEH PREDIKAT WBK/WBBM
PADA SATUAN KERJA WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI
TATA USAHA NEGARA PALEMBANG TAHUN 2025**

NO.	NAMA	JABATAN	
		KEDINASAN	TIM
1.	A. Syaifullah, S.H.	Ketua PT.TUN Palembang	Pembina
2.	Budhi Hasrul, S.H.	Wakil Ketua PT.TUN Palembang	Ketua Tim
3.	Ishak Rizal, S.T.	Sekretaris PT.TUN Palembang	Sekretaris Tim
4.	Hary Yuliansyah, A.Md.	Pranata Komputer Terampil	Wakil Sekretaris I
5.	Risa Setiawati, S.I.Kom.	Penata Keprotokolan	Wakil Sekretaris II
PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA PALEMBANG			
1.	Irhamto, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Koordinator
2.	Rahma Kurnia Fitri, S.H., M.H.	Panitera	Anggota
3.	Alkodar, S.H., M.H.	Panitera Muda Perkara	Anggota
4.	Debby Corazona Pratiwi, S.E.	Kepala Subbagian, Subbagian Keuangan dan Pelaporan	Anggota
5.	Medi Darmawansyah, S.H., M.H.	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	Anggota
6.	Fhareza Muhammad Gahar, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Anggota
7.	Linopa Angra Oktasona, A.Md.	Jurusita Pengganti	Anggota
8.	Tiara Antonisa Wielna, A.Md.A.B.	Pranata Keuangan APBN Terampil	Anggota
9.	M. Syaribi Andriansyah, Amd.Kom.	PPNPN	Anggota
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG			
1.	Susilowati Siahaan, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Koordinator
2.	Muhammad Abdullah, S.H.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian Dan Teknologi Informasi	Anggota
3.	Aprianto, S.E.	Penata Layanan Operasional	Anggota
4.	Firdaus Amin, S.E., M.M.	Penata Layanan Operasional	Anggota
5.	Feven Indri Yani, S.Kom.	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	Anggota
6.	Akbar Winda Nata, A.Md.	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
7.	Ichwan Al Faridsi, S.Pd.	PPNPN	Anggota
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BANDAR LAMPUNG			
1.	Husein Amin Effendi, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Koordinator
2.	Indra Mufti, S.H.	Panitera Muda Hukum	Anggota
3.	Hj. Deo Yuvanti, S.H.	Panitera Pengganti	Anggota
4.	Sulami, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Anggota
5.	Sri Wulan Luciyanti, S.H.	Panitera Pengganti	Anggota
6.	Dwi Indah Rosalina, S.H, M.H.	Jurusita Pengganti	Anggota
7.	R.M. Iqbal Tawakal, Amd.	PPNPN	Anggota

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA JAMBI			
1.	Herman Baeha, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Koordinator
2.	Nora Agustina, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran	Anggota
3.	Ade Kurniawan, S.E.	Jurusita Pengganti	Anggota
4.	Dhevit Miranda, A.Md.A.B	Pengolah Data dan Informasi	Anggota
5.	Basuki	Operator Layanan Operasional (PPPK)	Anggota
6.	Gabriela Ramadanti, S.H.	PPNPN	Anggota
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA BENGKULU			
1.	Sutiyono, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Koordinator
2.	Ressy Mirliana Sari, S.H., M.H.	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	Anggota
3.	Yurista Sukmah, S.Sos.	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	Anggota
4.	Isnaini, S.H., M.H.	Panitera Pengganti	Anggota
5.	Aprilia Berlianda, S.M.	Penata Layanan Operasional	Anggota
6.	M. Alviandi Pratama Putra, A.Md.	Juru Sita Pengganti	Anggota
7.	Tivri Manthiq Sibarani, S.T.	Teknisi Sarana dan Prasarana	Anggota
8.	Risky Usnarto, S.H.	PPNPN	Anggota
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PANGKALPINANG			
1.	Dr. Maftuh Effendi, S.H., M.H.	Hakim Tinggi	Koordinator
2.	Novalia Simanjuntak, S.H.	Kepala Subbagian Tata Usaha dan Rumah Tangga	Anggota
3.	Darul Kutni, S.H.	Panitera Pengganti	Anggota
4.	Maryani UB, S.H.	Panitera Pengganti	Anggota
5.	Fhareza Muhammad Gahar, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Anggota
6.	Mitha Claudia Elsivia, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Anggota
7.	Tunky Ramadhan	Operator Layanan Operasional (PPPK)	Anggota
8.	Nova Yuliana	PPNPN	Anggota

Ketua Pengadilan Tinggi
Tata Usaha Negara Palembang,


A. Syaifullah

A